

SKRIPSI

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau
Pekanbaru*



OLEH:

RUTH NITA ULI
NPM : 155310883

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RUTH NITA ULI
NPM : 155310883
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-S1
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pelalawan

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Yusrawati, SE., M.Si

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN PELALAWAN**

RUTH NITA ULI

155310883

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 OPD pada Kabupaten Pelalawan, dan responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian keuangan pada instansi dan dinas yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dengan 58 responden. Metode pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pelalawan. Secara parsial, penyajian laporan keuangan dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pelalawan.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

***THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS,
THE ACCESSIBILITY OF FINANCIAL REPORTS AND INTERNAL
CONTROLS TO ACCOUNTABILITY OF REGIONAL FINANCIAL
MANAGEMENT IN PELALAWAN DISTRICT***

RUTH NITA ULI

155310883

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the presentation of financial statements, the accessibility of financial reports and internal controls to accountability of regional financial management in Pelalawan District. The population in this study was 30 OPD of Pelalawan District, and the respondents in this study is the head of finance and head of sub-section finance agency and office of which is part of the organization device area in the District Pelalawan.

The purposive sampling technique was used and 58 respondents were involved. The data were collected through survey using the questionnaire distributed to the respondents. The data were analyzed using the multiple regression analysis in which the SPSS program version 22 was used.

The result of the study showed that variable presentation of financial statements, accessibility financial statements and internal controls simultaneously affect the accountability financial management area in the District Pelalawan. Partially, the presentation of financial statements and internal controls has a significant and positive effect on the accountability of regional financial management, but the variable accessibility of financial statements negatively affects the accountability of regional financial management in Pelalawan district.

Keywords: *Presentation of financial statements, Accessibility of financial statements, Internal controls, Accountability of regional financial management.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pelalawan”***.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan dan diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Selain dari itu penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua ku, **Rudin Sinaga** dan **Darmawaty Sihombing** yang telah mencurahkan kasih sayang, jerih payah, limpahan do'a dan semangatnya serta dorongan baik moril maupun materil sehingga tercapainya cita-citaku.
2. Bapak **Drs. Abrar,M.Si,Ak,CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

3. Ibu **Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu **Yusrawati, SE, M.Si, CA** selaku Pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu penulis dalam mengoreksi sehingga dapat menghasilkan karya tulis sesuai dengan apa yang diharapkan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis dan mengajarkan ilmu selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Seluruh pegawai Tata Usaha dan anggota OPD Kabupaten Pelalawan yang telah bersedia memberi kemudahan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk abangku tersayang **Welly Sinaga** serta keluarga besar lainnya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat sejawatiku, Nurul Hasanah, Putri Ananda, Ambar Widhi dan Dwi Syahputri. Terima kasih juga kepada temanku Aminatur Rahma dan Victoria Turangan yang selalu memberi semangat, dukungan, motivasi, serta menemani juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh teman seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2015.

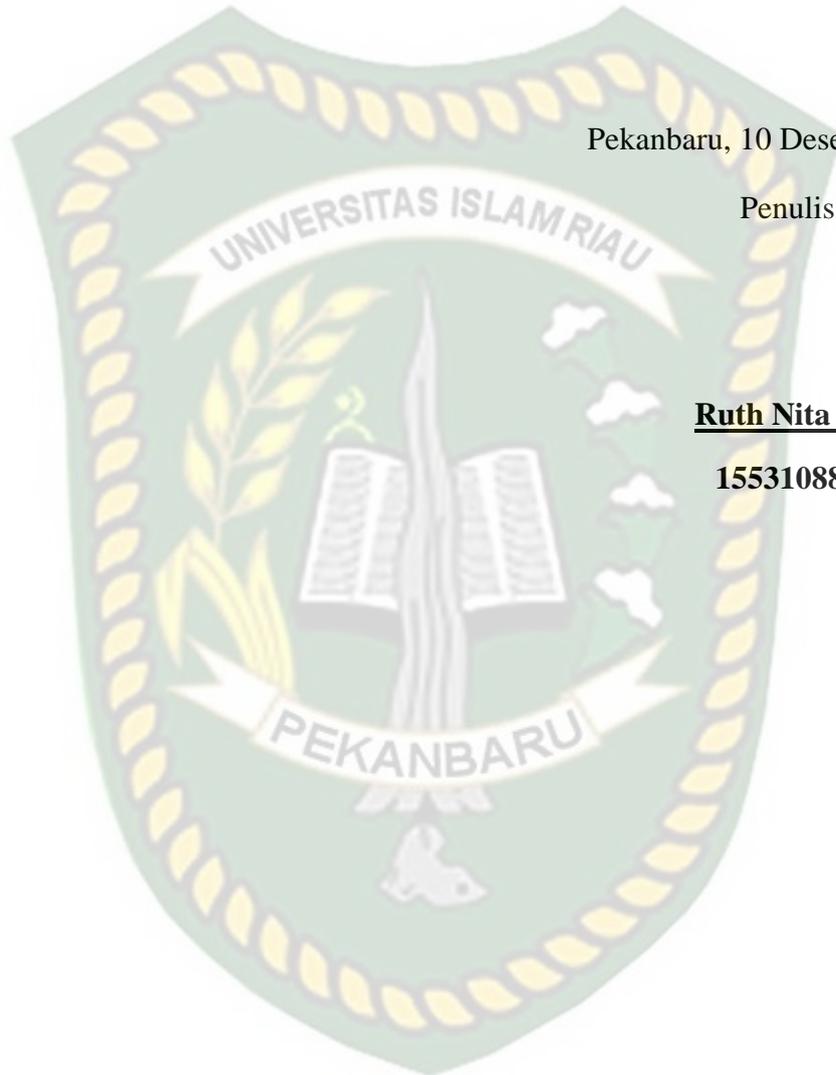
Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya, oleh sebab itu dengan segala ketulusan hati penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Penulis

Ruth Nita Uli

155310883



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
A. Telaah Pustaka	10
1. Penyajian Laporan Keuangan	10
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	14
3. Pengendalian Internal.....	16
4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	19
5. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	22
6. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	22
7. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	23

8. Penelitian Terdahulu	24
9. Model Penelitian	26
B. Hipotesis Penelitian.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian.....	28
B. Operasional Variabel Penelitian.....	28
C. Populasi dan Sampel	30
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan	38
B. Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan	40
C. Wilayah Geografis	41
D. Nama Bupati.....	43
E. Struktur Organisasi Kabupaten Pelalawan	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden.....	44
B. Statistik Deskriptif	46

C. Uji Kualitas Data.....	47
1. Uji Validitas	47
2. Uji Reliabilitas	47
D. Uji Asumsi Klasik	48
1. Uji Normalitas.....	48
2. Uji Multikolinearitas	51
3. Uji Heterokedastisitas	52
E. Analisis Data	53
F. Pengujian Hipotesis.....	54
1. Uji Simultan (Uji F)	54
2. Uji Parsial (Uji t).....	55
3. Koefisien Determinasi.....	56
G. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Penyajian Laporan Keuangan Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	57
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	58
3. Pengendalian Internal Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	58
4. Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	59

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel III.1	Operasional Variabel.....	29
Tabel III.2	Sampel Dalam Penelitian.....	32
Tabel V.1	Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian.....	44
Tabel V.2	Karakteristik Responden.....	45
Tabel V.3	Statistik Deskriptif.....	46
Tabel V.4	Hasil Uji Validitas Data.....	47
Tabel V.5	Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel V.6	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	50
Tabel V.7	Coefficients ^a	51
Tabel V.8	Hasil Uji t Coefficients ^a	53
Tabel V.9	Hasil Uji F ANOVA ^a	55
Tabel V.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary ^b	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Model Penelitian.....	27
Gambar V.1	Histogram dengan Kurva Normal.....	49
Gambar V.2	Kurva Normal P-Plot.....	50
Gambar V.3	Diagram Scatterplot.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabulasi Data Primer
- Lampiran 3 Output Hasil Uji Data



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi yang terjadi di Indonesia saat ini, masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Hal ini disebabkan oleh asas otonomi daerah membuat masyarakat meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, sehingga tuntutan ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah

Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik Mulyana (2006, 3). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

mengatur pedoman pengelolaan keuangan sistem akuntansi keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada kemudahan akses publik terhadap laporan keuangan organisasi sektor publik yang dapat dipahami.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan daerah. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012).

Disamping melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Aksesibilitas laporan keuangan juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas merupakan penunjang untuk memfasilitasi masyarakat dalam hal mengetahui laporan keuangan pemerintah di mana pemerintah memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dapat melihat dan meninjau laporan keuangan pemerintah tiap tahunnya, agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Suatu akuntabilitas keuangan tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya pengawasan dari sistem pengendalian intern. Oleh karena itu diperlukannya sistem pengendalian intern agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Undang-Undang. Sistem pengendalian intern yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas dan mencegah terjadinya kerugian negara.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian yang dilakukan Nuria Rahma (2017) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem

pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Riyansa, dkk (2015) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sande (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sari (2014), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Siak.

Penelitian yang dilakukan Hayani (2014) yang berjudul pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada skpd Kabupaten Siak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nuria Rahma (2017), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian. Objek penelitian Nuria Rahma (2017) yaitu pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sedangkan penulis menggunakan objek penelitian pada OPD Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu penulis ingin meneliti kembali dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis memilih Kabupaten Pelalawan sebagai objek penelitian seperti yang dikutip dari website resmi bpkad.pelalawankab.go.id (2018), bahwa Kabupaten Pelalawan kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Riau. Tanpa bermaksud mengurangi pencapaian yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bahwa peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait lemahnya sistem pengendalian internal atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2013-2017. Salah satunya Penatausahaan Investasi Nonpermanen Pemkab Pelalawan TA 2013 yang belum memadai dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini Pemkab Pelalawan masih berusaha membenahi SPIP & APIP agar dapat mencapai Level 3 dimana sebelumnya SPIP & APIP di Pemkab tersebut terdefinisi dan terkelola masih dalam kategori 1,7. Peningkatan levelling SPIP & APIP ini nantinya juga akan tercatat secara nasional, sebagai realisasi

pencapaian target di tahun 2019. Sehingga hal tersebut sesuai untuk dijadikan responden dalam menguji seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di kabupaten pelalawan.

Dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pelalawan.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan ?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan ?
3. Apakah pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan ?
4. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pelalawan.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang beberapa hal yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan/referensi bagi yang berminat melakukan penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi pemerintah daerah yaitu walikota maupun jajaran pejabat yang mengelola keuangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji kualitas data, teknik analisis data, pengujian hipotesis, dan koefisiensi determinasi.

BAB IV GAMBARAN UMUM

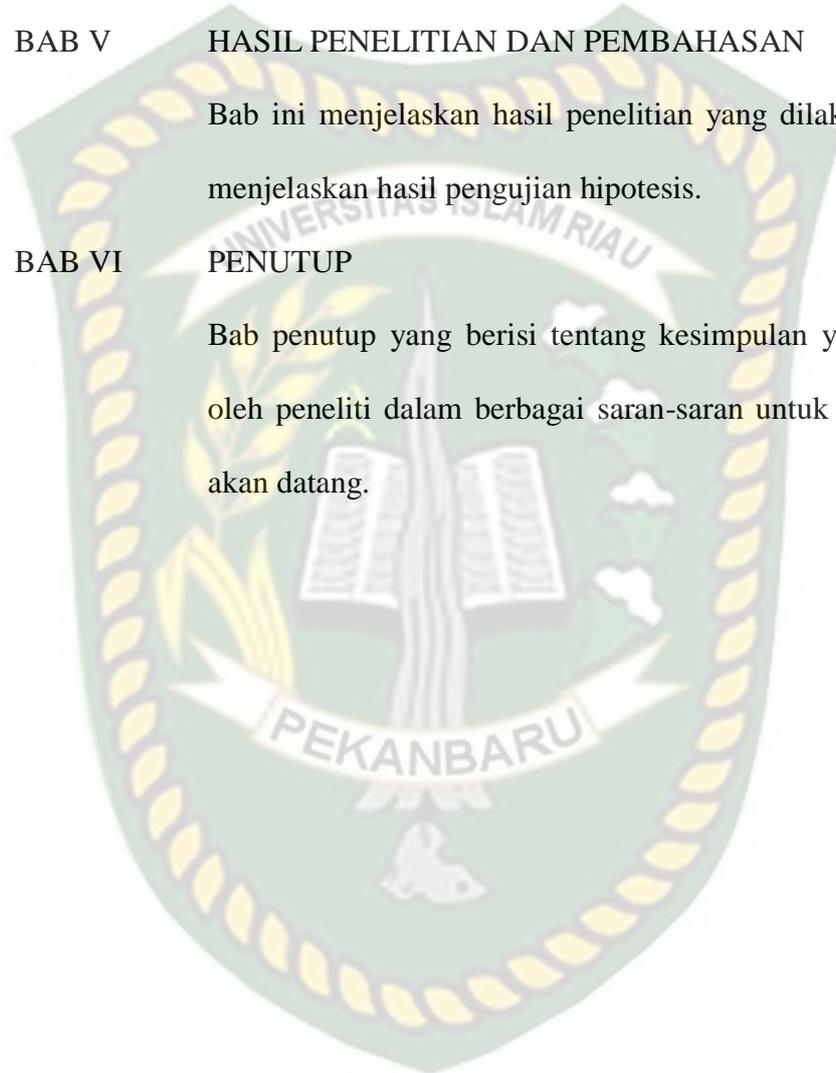
Bab ini membahas tentang sejarah singkat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, organisasi dan tata kerja daerah di Kabupaten Pelalawan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan serta menjelaskan hasil pengujian hipotesis.

BAB VI PENUTUP

Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dalam berbagai saran-saran untuk masa yang akan datang.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai: (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun indikator yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan tersebut yaitu:

- a. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan.
- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, yaitu informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.
- d. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Ibnu Wardana (2016), terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan yaitu:

1. Benefit
2. Prediktif
3. Tepat Waktu
4. Kelengkapan
5. Representatif
6. Andal
7. Konsistensi
8. Dapat Dipahami

Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah: (1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan; (3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan; (4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya; (6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) komponen laporan keuangan pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelapor terhadap anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelapor mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca

setiap entitas mengklarifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklarifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktiva operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara wajar.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Pengertian aksesibilitas dalam Kamus Besar Indonesia adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung dan aksibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksibel

dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja. Tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui dan memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

“Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*).”
Mardiasmo (2009:197)

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koester, 2002 yang dikutip Rohman, 2009).

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas yang efektif tergantung akses publik terhadap laporan pertanggung jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses atas laporan kinerja organisasi publik dapat diperoleh melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website internet dan forum yang memberikan perhatian langsung atas peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah pasal 103 dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misal dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya. Dengan begitu akses masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan akan lebih mudah.

Menurut Nurmuthmainnah (2015) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas yaitu:

1. Terbuka di media masa seperti koran
2. Mudah diakses
3. Ketersediaan informasi

3. Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inti dasar dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah terciptanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bisa mewujudkan suatu praktek-praktek *good governance*. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu (Kartika, 2015). Pengendalian intern juga merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Afriyanti, 2011).

Adapun struktur pengendalian internal terdiri atas lima unsur pokok menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kelima unsur pengendalian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian terdiri dari:
 - a) Penegakan integritas dan nilai etika
 - b) Komitmen terhadap kompetensi
 - c) Kepemimpinan yang kondusif
 - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
2. Penilaian Resiko
Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri dari:
 - a) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
 - b) Penetapan tujuan dan tingkat kegiatan
 - c) Identifikasi resiko
 - d) Analisis resiko
 - e) Mengelola resiko selama perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari sifat dan tugas serta fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian internal terdiri dari:

- a) Review atas kinerja instansi yang bersangkutan
 - b) Pembinaan sumber daya manusia
 - c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d) Pengendalian fisik atas aset
 - e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
- ### 4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan atas informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
- ### 5. Pemantauan Pengendalian Internal
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui:
- a) Pemantauan berkelanjutan
 - b) Evaluasi terpisah
 - c) Penyelesaian audit

Penerapan sistem pengendalian internal bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Tujuan pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi.

Menurut Ibnu Wardana (2016) terdapat 9 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal yang meliputi:

1. Integritas
2. Struktur organisasi
3. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
4. Pengawasan
5. Penilaian resiko
6. Dokumentasi
7. Otorisasi

8. Informasi dan komunikasi
9. Pemantauan

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme Riantiarno & Azlina (2011).

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam (Sitompul, 2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan, kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2007).

Dimensi yang harus dipenuhi dalam pemenuhan akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009: 21) dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitass Kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan menurut Ibnu Wardana (2016) yaitu:

1. Prinsip penganggaran
2. Prinsip perencanaan
3. Prinsip pembuatan
4. Peinsip pengajuan
5. Prinsip pelaksanaan
6. Prinsip pembiayaan
7. Prinsip evaluasi kinerja
8. Perbandingan evaluasi kinerja
9. Pencatatan

5. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordriawan, 2010). Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sande (2013) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan

dipahami. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Sande (2013) mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Kartika (2015) juga menyimpulkan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan OPD maka akan semakin baik akuntabilitas laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini karena jika suatu OPD membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik maka instansi tersebut memberikan keleluasaan bagi pihak yang ingin mengakses laporan pertanggungjawaban yang dibuatnya.

7. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Afriyanti, 2011). Pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan manajerial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi.

Sari (2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu hasil penelitian

Rahma (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat, karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Peggy Sande (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)	Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Reni Rafita Sari (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	Variabel Independen : Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Variabel	Variabel sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

	Kabupaten Siak	Dependen: Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Siak	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Siak.
Hayani (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Siak.	Variabel Independen : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan SPIP Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Siak.	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan.
Riyansa, dkk (2015)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen : Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan, aksesibilitas laporan keuangan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Nuria Rahma (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Variabel Independen : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh

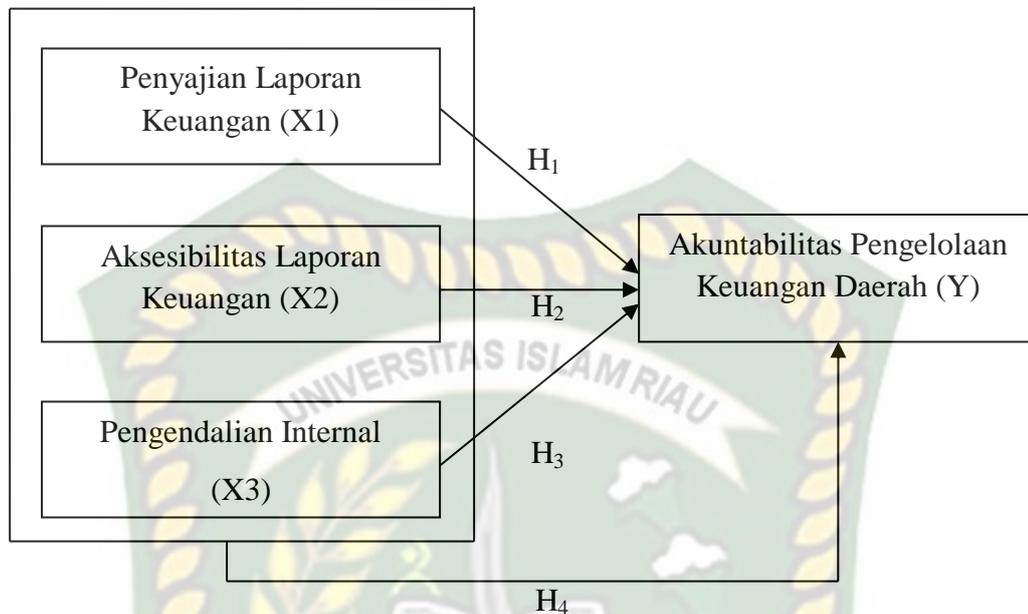
	(Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu)	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan dengan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
--	--	---	---

Sumber : Diolah Berbagai Data

9. Model Penelitian

Model akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan melalui model penelitian pada gambar II.1.

Gambar II.1
Model Penelitian



B. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah:

- H1 :Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H2 :Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H3 :Pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H4 :Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan, sebagai salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau.

B. Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah (X1), aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) dan pengendalian internal (X3). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert yaitu responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, objek, atau kejadian (Kuncoro, 2003: 157). Untuk penilaiannya menggunakan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu : Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = Ragu-Ragu, Skor 4 = Setuju, Skor 5 = Sangat Setuju. Berikut ringkasan definisi operasional variabel yang terdapat pada tabel III.1.

Tabel III.1
Operasional Variabel

No	Variabel dan Defenisi Operasional	Indikator
1	<p>Variabel Independen (X1): Penyajian laporan keuangan merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Benefit - Prediktif - Tepat waktu - Kelengkapan - Representatif - Andal - Konsistensi - Dapat dipahami
2	<p>Variabel Independen (X2): Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terbuka di media massa - Mudah diakses - Ketersediaan informasi
3	<p>Variabel Independen (X3): Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Integritas - Struktur organisasi - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab - Pengawasan - Penilaian resiko - Dokumentasi - Otorisasi - Informasi dan komunikasi - Pemantauan
4	<p>Variabel Dependen (Y): Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip penganggaran - Prinsip perencanaan - Prinsip pembuatan - Prinsip pengajuan - Prinsip pelaksanaan

		<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip pembiayaan - Prinsip evaluasi kinerja - Perbandingan evaluasi kinerja - Pencatatan
--	--	---

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu, yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini mengambil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk kecamatan tingkat Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 42 OPD. Berikut daftar OPD tingkat Kabupaten Pelalawan yang dapat dilampirkan dibawah ini:

No	Nama OPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
7	Badan Kepegawaian Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Badan Lingkungan Hidup
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Sosial
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	Dinas Perikanan dan Kelautan
16	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
17	Dinas Pendidikan

18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Peenduduk dan Keluarga Berencana
19	Dinas Koperasi, UKM & Perindag
20	Dinas Kesehatan
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25	Dinas Perkebunan dan Peternakan
26	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar
29	Dinas Pertambangan dan Energi
30	RSUD Selasih
31	Kecamatan Bandar Petalangan
32	Kecamatan Bandar Sei Kijang
33	Kecamatan Bunut
34	Kecamatan Kerumutan
35	Kecamatan Kuala Kampar
36	Kecamatan Langgam
37	Kecamatan Pangkalan Kerinci
38	Kecamatan Pangkalan Kuras
39	Kecamatan Pangkalan Lesung
40	Kecamatan Pelalawan
41	Kecamatan Teluk Meranti
42	Kecamatan Ukui

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini mengambil 30 OPD sebagai responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Kepala bagian keuangan dan Kepala Sub bagian keuangan) untuk memenuhi data statistik. Data responden yang dapat dilampirkan adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Sampel Dalam Penelitian

NO	Nama OPD	Sampel
1	Sekretariat Daerah	2
2	Sekretariat DPRD	2
3	Inspektorat	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2
6	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	2
7	Badan Kepegawain Daerah	2
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
10	Badan Lingkungan Hidup	2
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
12	Dinas Sosial	2
13	Dinas Perhubungan	2
14	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2
15	Dinas Perikanan dan Kelautan	2
16	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2
17	Dinas Pendidikan	2
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
19	Dinas Koperasi, UKM & Perindag	2
20	Dinas Kesehatan	2
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	2
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2
25	Dinas Pekerbunan dan Peternakan	2
26	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	2
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga	2
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar	2
29	Dinas Pertambangan dan Energi	2
30	RSUD Selasih	2
	Jumlah	60

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Data tersebut merupakan persepsi atau tanggapan responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari jawaban responden atau kuesioner yang diterimanya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah instrumen untuk memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden yang ditetapkan sebagai sampel penelitian. Kuesioner yang digunakan diadopsi dari Skripsi Peggy Sande (2013) untuk variabel akuntabilitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, dan Hayani (2014) untuk variabel pengendalian internal.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dan untuk mendapatkan bukti empirik sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Data di peroleh dari hasil kuesioner, kemudian di kuantitatifkan agar dapat dianalisis secara statistik.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur, dengan kata lain validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009: 49). Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} semua instrumen penelitian dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Dengan demikian, uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten/tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach's Alpha*.

c. Uji Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov – Smirnov*. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% maka jika nilai P_{value} (Sig.) diatas nilai signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa data diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2013; 105). Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* melalui program SPSS. Nilai umum yang bisa dipakai adalah nilai *Tolerance* $> 0,1$ atau *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser* dan *Scatterplot* dengan pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dengan uji *Scatterplot* apabila jika ada pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka dapat diindikasikan terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana salah satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. *Statistical Package For Social Science* (SPSS) akan digunakan untuk membantu proses analisis regresi linier berganda. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
X1	: Penyajian Laporan Keuangan Daerah
X2	: Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
X3	: Pengendalian Internal
a	: Konstanta
b1	: Koefisien regresi dari X1
b2	: Koefisien regresi dari X2
b3	: Koefisien regresi dari X3
e	: Kesalahan residual (error turn)

a. Uji Statistik F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis regresi berganda modelnya sudah tepat atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara simultan.

Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai sig yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah fix.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 0,05$ (5%). Jika nilai t hitung $>$ t tabel dengan signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan di bawah 0,05.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) untuk mengukur kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. *Range* nilainya antar 0 sampai dengan 1. Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah Kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945.

Sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Pelalawan termasuk ke dalam bagian Kabupaten Kampar yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas. Kabupaten Pelalawan resmi dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Kemudian setelah terbit Surat Dirjen PUOD No.138/1775/PUOD tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 kecamatan, yang terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapi berdasarkan SK Gubernur

Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan *Pekan Tua*, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000. Dengan terbentuknya Legislatif (DPRD) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T. Azmun Jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006.

Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut

terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 s/d 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau.

B. Visi Dan Misi Kabupaten Pelalawan

Visi Kabupaten Pelalawan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global Secara Berkelanjutan Dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertaqwa Dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025”**. Makna dari visi tersebut adalah: Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera; Pemberdayaan ekonomi kerakyatan; Pertanian yang unggul; Industri yang tangguh; dan Masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya.

2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari.
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

C. Wilayah Geografis

1. Letak dan Luas

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" Lintang Utara dan 0°20" Lintang Selatan serta antara 100°42' - 103°28' Bujur Timur. Luas Kabupaten Pelalawan adalah 12.490,42 Km². Secara geografis, Pelalawan berada di 00°46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'.

Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daratan rendah dan sebagian merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter, dengan kemiringan lahan rata-rata ± 0-15% dan 15-40%. Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat sebuah Sungai Kampar yang panjangnya ± 413.5 Km, dengan

kedalaman rata-rata $\pm 7,7$ meter dan lebar rata-rata ± 143 meter. Sungai ini dan anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya perikanan dan irigasi.

2. Batas

Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Sebelah Bara : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau.

3. Iklim

Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 mm sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara $33,0-35,4^{\circ}$ C, sedangkan pada malam hari berkisar antara $20,5-23,2^{\circ}$ C. Suhu udara maximum $35,4^{\circ}$ C terjadi pada bulan Mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah $20,5^{\circ}$ C terjadi pada bulan Juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83%.

4. Jarak Ibukota

Jarak lurus Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci ± 0 Km.

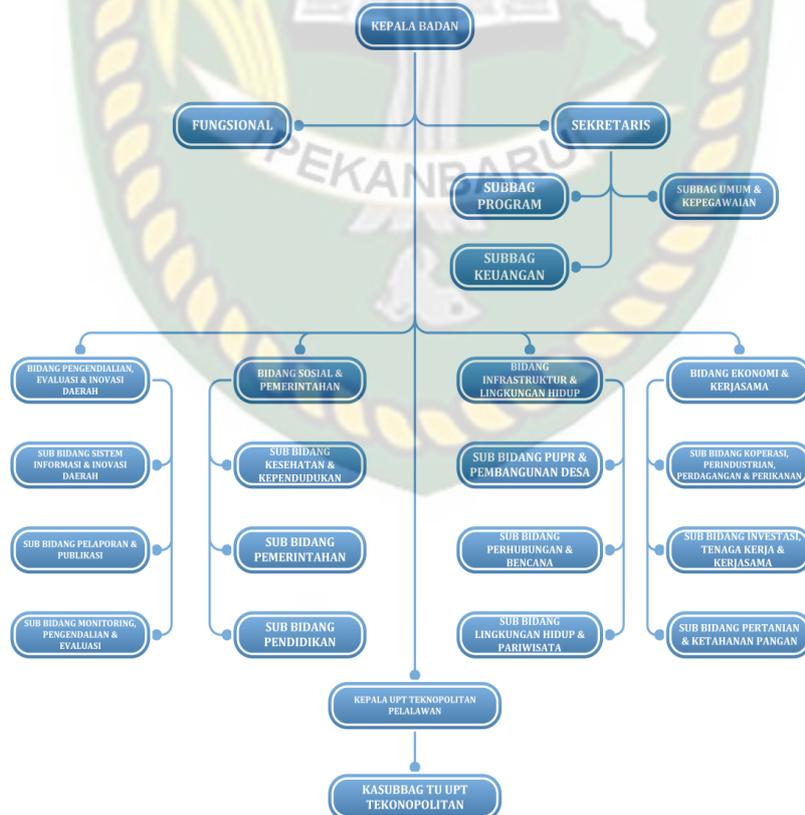
Sedangkan jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 Km.

D. Nama Bupati

Dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2011 ditetapkan pasangan H.M. Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan. Adapun riwayat pekerjaannya, yaitu:

No.	Jabatan	Tahun
1.	Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan	1999-2004
2.	Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan	2004-2009
3.	Wakil Bupati Pelalawan	2006-2011
4.	Bupati Pelalawan	2011-2016
5.	Bupati Pelalawan	2017-2021

E. Struktur Organisasi Kabupaten Pelalawan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner pada 30 instansi, dinas, badan dan pada Kabupaten Pelalawan. Responden dari penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Keuangan yang ada di OPD Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 30 Oktober 2019 dan selesai pada tanggal 11 November 2019. Berdasarkan tabel V.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 60 namun, hanya 58 yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil yang ada, respon pegawai terhadap penelitian ini cukup baik terlihat dari banyaknya kuesioner yang diisi oleh para responden.

Tabel V.1
Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang dikirim	60	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	2	3,33%
Total kuesioner yang kembali	58	96,67%

Sumber: Data Olahan, 2019

Data karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan dan masa kerja responden tercantum pada tabel V.2 sebagai berikut:

Tabel V.2
Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-laki	31	53,5%
	2. Perempuan	27	46,5%
	Total	58	100%
2	Pendidikan Terakhir		
	1. SMA	-	0%
	2. D3	-	0%
	3. S1	42	72,4%
	4. S2	16	27,6%
	Total	58	100%
3	Masa Bekerja		
	1. < 5 Tahun	4	6,9%
	2. 5-10 Tahun	24	41,4%
	3. > 10 Tahun	30	51,7%
	Total	58	100%

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel V.2 di atas karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelaminnya menunjukkan bahwa dari 58 responden jumlah responden laki-laki sebanyak 31 orang (53,5%) lebih banyak dibandingkan jumlah responden perempuan yang berjumlah 27 orang (46,5%).

Dilihat dari pendidikan terakhir responden setiap instansi diketahui pendidikan terakhir S1 menjadi responden terbanyak dengan jumlah 42 orang (72,4%), dan yang bergelar S2 yaitu hanya 16 orang (27,6%). Selanjutnya, tabel V.2 menunjukkan bahwa dari 4 responden (6,9%) telah bekerja selama kurang dari 5 tahun, 24 responden (41,4%) telah bekerja selama 5-10 tahun, dan untuk masa kerja yang lebih dari 10 tahun memiliki jumlah responden yaitu sebanyak 30 responden (51,7%).

B. Statistik Deskriptif

Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh gambaran mengenai statistik deskriptif variabel penelitian pada Tabel V.3 sebagai berikut:

Tabel V.3

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	58	3.63	4.88	4.3470	.34015
x2	58	3.33	5.00	4.3333	.46306
x3	58	2.33	3.33	2.7816	.28459
Y	58	3.63	5.00	4.2543	.35507
Valid N (listwise)	58				

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel V.3 di atas, maka dapat dijelaskan penggambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Penyajian Laporan Keuangan (x1) memiliki jumlah sampel sebanyak 58, dengan nilai minimum 3,63, nilai maksimum 4,88, dan mean (nilai rata-rata) sebesar 43,47. Dengan *Standart Deviation* sebesar 34,015.
2. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (x2) memiliki jumlah sampel sebanyak 58, dengan nilai minimum 3,33, nilai maksimum 5, dan mean (nilai rata-rata) sebesar 43,33. Dengan *Standart Deviation* sebesar 46,306.
3. Variabel Pengendalian Internal (x3) memiliki jumlah sampel sebanyak 58, dengan nilai minimum 2,33, nilai maksimum 3,33, dan mean (nilai rata-rata) sebesar 27,81. Dengan *Standart Deviation* sebesar 28,459.
4. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (y) memiliki jumlah sampel sebanyak 58, dengan nilai minimum 3,63, nilai maksimum 5, dan mean (nilai rata-rata) sebesar 42,54. Dengan *Standart Deviation* sebesar 35,507.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuesioner yang telah disebarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
Penyajian Laporan Keuangan	0.443** - 0.719**	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.758** - 0.903**	Valid
Pengendalian Internal	0.403** - 0.696**	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0.404** - 0.700**	Valid

Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Dari hasil pengujian validitas yang dilakukan pada tabel V.4 di dapat bahwa skor masing-masing butir dan skor total (*pearson correlation*) menunjukkan korelasi signifikan pada level 0,01 dan 0,05 dan lebih besar dari nilai r_{tabel} maka seluruh kuesioner dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara melihat *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	0.700	Reliable
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.753	Reliable
Pengendalian Internal	0.786	Reliable
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	0.608	Reliable

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel V.5 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 yang artinya variabel dalam penelitian ini dikatakan reliable.

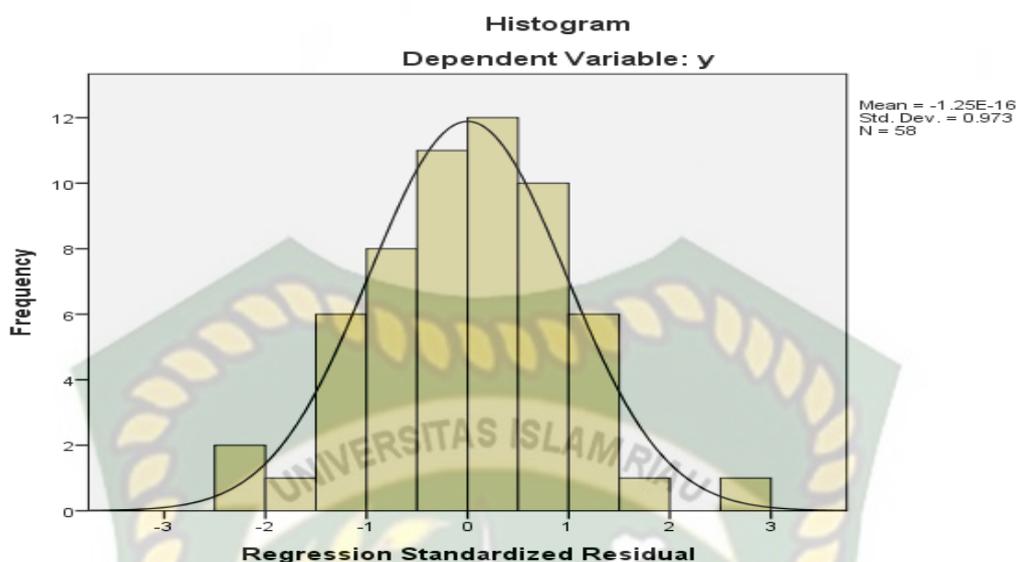
D. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu bebas normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas.

1) Uji Normalitas

Normalitas distribusi dalam penelitian ini dapat dilihat pada histogram dan *Normal Probability Plot*. Jika gambar histogram memperlihatkan posisi normal tidak miring maka variabel penelitian berdistribusi normal dan jika data *Normal Probability Plot* menyebar disekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Histogram pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar V.1 berikut:

Gambar V.1

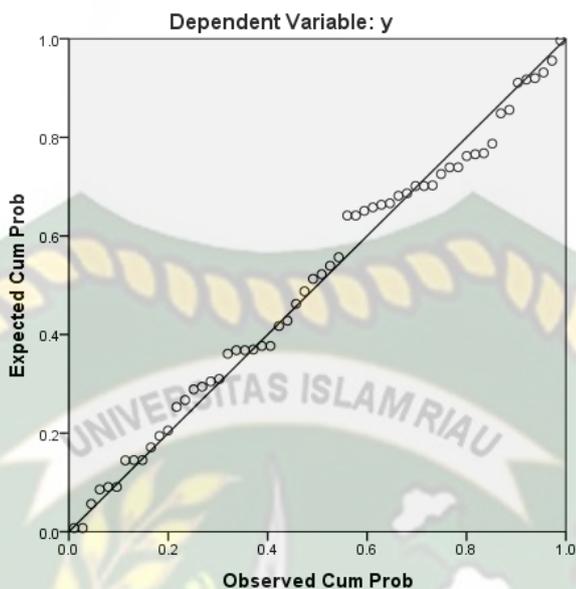


Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Histogram pada gambar V.1 diatas telah memperlihatkan posisi normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan tepat ditengah, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Untuk memperjelas hasil normalitas data, *Normal Probability Plot* dapat diperhatikan pada gambar V.2 berikut:

Gambar V.2

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan gambar V.2 dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.6
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20646746
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.071
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel V.6, *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari uji *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal dan lulus uji normalitas data.

2) Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen saling berhubungan secara linear. Jika diantara variabel-variabel independen yang digunakan sama sekali tidak berhubungan satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji ini dilakukan dengan program SPSS dan hasilnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel V.7

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
x1	.427	2.340
x2	.499	2.003
x3	.771	1.297

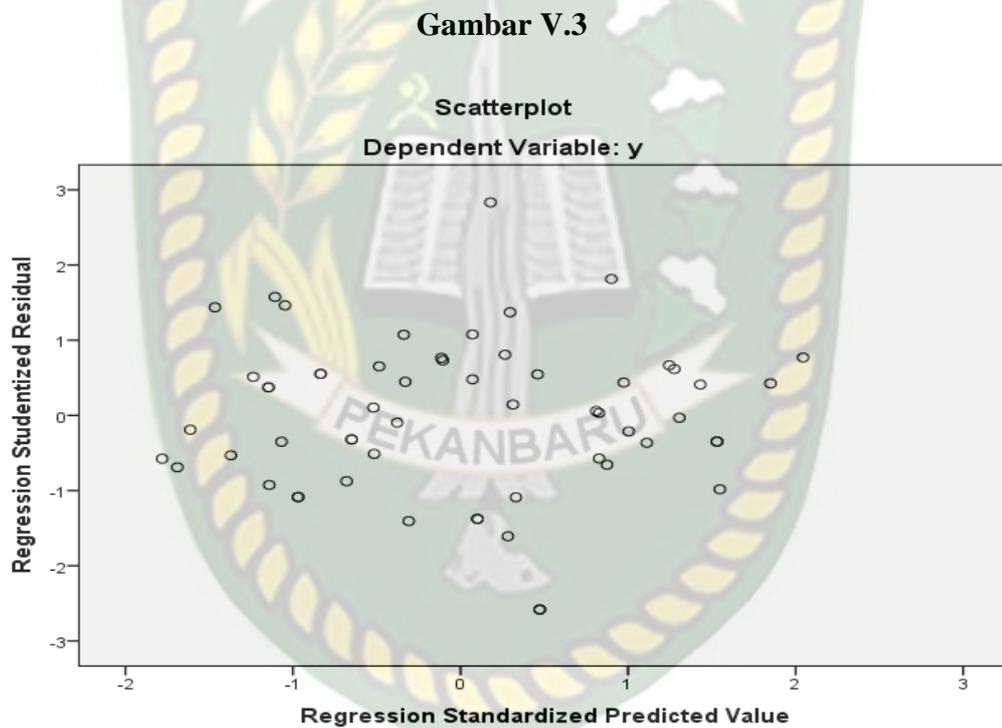
a. Dependent Variable: y

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa nilai *Tolerance* untuk masing-masing variabel independen tidak kurang dari 0,1 dan untuk nilai *VIF* tidak lebih dari 10. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak mengandung gejala multikolinearitas di antara masing-masing variabel.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatter Plot* dimana jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Pengujian dapat dilihat pada gambar V.3 berikut:



Sumber: Data *Output* SPSS, 2019

Berdasarkan gambar V.3 dapat dilihat bahwa, titik-titik penyebaran tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

E. Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 22 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.988	.398		2.482	.016
x1	.519	.126	.497	4.106	.000
x2	-.221	.086	-.288	-2.570	.013
x3	.707	.112	.567	6.289	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 0,988 + 0,519X_1 + (-0,221)X_2 + 0,707X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
- X1 = Penyajian Laporan Keuangan
- X2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
- X3 = Pengendalian Internal
- a = Konstanta
- e = *Error*

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 0,988 mengindikasikan bahwa jika variabel independen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan

keuangan, dan pengendalian internal adalah 0 (nol) maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan bernilai 0,988.

- b. Nilai koefisien regresi variabel X_1 yaitu penyajian laporan keuangan bernilai positif yaitu 0,519 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,519.
- c. Nilai koefisien regresi variabel X_2 yaitu aksesibilitas laporan keuangan bernilai negatif yaitu -0,221 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar -0,221.
- d. Nilai koefisien regresi variabel X_3 yaitu pengendalian internal bernilai positif yaitu 0,707 ini dapat diartikan bahwa setiap pengendalian internal sebesar 1%, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebesar 0,707.

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji simultan atau F dengan menggunakan SPSS versi 22 dapat dilihat dari tabel V.9 berikut:

Tabel V.9

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.757	3	1.586	35.236	.000 ^b
	Residual	2.430	54	.045		
	Total	7.186	57			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Data Output SPSS, 2019

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis H4 yaitu terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pelalawan diterima, artinya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keeuangan, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis uji signifikansi parsial (uji t). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikan dari masing-masing variabel. Apabila signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima dan apabila signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hasil uji t terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel V.8.

3. Koefisien Determinasi

Tabel V.10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.814 ^a	.662	.643	.21213

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber: Data Output SPSS, 2019

a. Uji Variabel Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.8, dapat dilihat bahwa nilai untuk variabel penyajian laporan keuangan dengan signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), ini menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian H_1 yang menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Uji Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.8, dapat dilihat bahwa nilai untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan dengan signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ ($0,013 < 0,05$), ini menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian H_2 yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

c. Uji Variabel Pengendalian Internal (X_3)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel V.8, dapat dilihat bahwa nilai untuk variabel pengendalian internal dengan signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$), ini menunjukkan variabel pengendalian internal (X_3) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian H_3 yang menyatakan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal dapat memberikan sebuah pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan keandalan pelaporan keuangan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan menyajikan suatu laporan keuangan tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan

baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sande (2013) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Riyansa, dkk (2015) yang menunjukkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya suatu aksesibilitas dalam menyajikan pengelolaan keuangan daerah bagi para penggunanya.

Apabila suatu organisasi dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset daerah maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengendalian Internal Memiliki Pengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian ini, menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan

menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang baik maka akan terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini didasarkan pada tujuan sistem pengendalian internal yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulansari (2014), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Sari (2014) yang hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

4. Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.814 ^a	.662	.643	.21213

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa koefisien (R) sebesar 0,814 yang berarti bahwa korelasi/hubungan antara variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 81,4%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pada tabel V.10 juga menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* bernilai 0,643. Hal ini menunjukkan bahwa 64,3% akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dijelaskan oleh variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal sisanya sebesar 35,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini. Jadi, secara simultan variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuria Rahma (2017), yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan ini menyatakan bahwa menerapkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal yang baik maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal ini sesuai dengan tujuan akuntabilitas yang baik yaitu informasi yang diberikan mudah dipahami.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel penyajian laporan keuangan dan variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Pelalawan.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Pelalawan.
3. Berdasarkan pengujian secara simultan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Pelalawan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan yang menjadi subjek dalam penelitian ini agar meningkatkan akses informasi mengenai laporan keuangan yang dapat dijangkau masyarakat luas dan pengetahuan terhadap laporan keuangan terutama dalam laporan keuangan berbasis

akrual yang digadangkan berbasis akrual lebih menjamin informasi yang bisa diandalkan karena mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif, relevan dan keputusan ekonomi yang lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, agar dapat memperluas atau menambah populasi dan sampel penelitian di luar Kabupaten Pelalawan.
3. Penelitian ini masih terbatas pada variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal, bagi peneliti berikutnya disarankan menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti penerapan informasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012. (<http://www.pekanbaru.bpk.go.id>, di akses pada tanggal 29 Mei 2019).
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Erlina dan Rasdianto, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan: Penerbit Brama Ardian.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. ANDI: Yogyakarta.
- Mulyana, Budi. 2006. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”, Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Mustofa, Anis Iqbal. 2012. “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang”, Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyatno, D. 2009. SPSS untuk analisis korelasi regresi dan multivariate. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahma, Nuria. 2017. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu)”. Jurnal Akuntansi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Sande, Peggy. 2013. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukhemi. 2010. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen.Vol.5. April: 85-100.
- Wulansari dkk, 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung (Survey pada Dinas Kota Bandung). Skripsi. Universitas Widyatama.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____.Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
- _____. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan sistem akuntansi keuangan daerah.